

Judul : Rekam jejak kuat di PBB, TNI mumpuni jaga perdamaian Gaza
Tanggal : Senin, 17 November 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Rekam Jejak Kuat Di PBB TNI Mumpuni Jaga Perdamaian Gaza

WAKIL Ketua Komisi I DPR Anton Sukartono mendukung rencana Pemerintah mengirim 20 ribu pasukan perdamaian ke Gaza. Diyakini, TNI mumpuni menjalankan tugas sebagai pasukan perdamaian berdasarkan rekam jejak di misi PBB sebelumnya.

Menurut Anton, penentuan model pasukan merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto sebagai panglima tertinggi. Pengiriman pasukan tentu mempertimbangkan penilaian teknis dari Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI.

"Harapannya, pasukan gabungan di bawah mandat PBB yang fokus pada bantuan kemanusiaan, rekonstruksi, dan pemeliharaan keamanan," ujar Anton di Jakarta, Minggu (16/11/2025).

Politikus Partai Demokrat itu mengatakan, TNI memiliki rekam jejak kuat dalam misi perdamaian PBB seperti Pasukan Penjaga Perdamaian PBB Di Lebanon (UNIFIL). Karena itu, kebutuhan personel yang akan dikirimkan pasti sudah dipertimbangkan dengan baik sesuai dengan tujuan misi perdamaian.

Anton memandang, keterlibatan Indonesia harus sepenuhnya berada dalam kerangka mandat PBB untuk memastikan legitimasi internasional, perlindungan personel, serta penguatan unsur kemanusiaan. Terutama, tenaga medis dan fasilitas kesehatan lapangan bagi warga sipil.

"Bersamaan dengan itu, diplomasi aktif harus terus dikedepankan sebagai jalan menuju solusi dua-negara yang adil dan

berkelanjutan," katanya.

Dia menyebut konsistensi keberpihakan Indonesia terhadap perdamaian bukan hal baru. Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono memberikan contoh konkret melalui berbagai langkah seperti penguatan kontribusi Indonesia dalam misi-misi perdamaian PBB, diplomasi aktif di OKI dan PBB terkait Palestina.

"Selain itu, Indonesia juga terus dalam mendorong gencatan senjata dan bantuan kemanusiaan di berbagai forum internasional," terangnya.

Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksano menambahkan, kontribusi ini harus dirancang secara matang. Dia meminta misi ini dilandaskan dengan hukum internasional. Pasalnya, aspek paling mendasar yang perlu dijaga adalah legitimasi dan koordinasi internasional.

Pengiriman pasukan, sambungnya, harus berada dalam kerangka mandat PBB serta mendapat dukungan dari negara-negara kawasan dan para pemangku kepentingan terkait. "Tanpa dasar hukum dan dukungan internasional yang kuat, misi ini berpotensi menghadapi resistensi atau bahkan penolakan dari pihak-pihak yang terlibat langsung di lapangan," kata Dave.

Dave menyebut, pasukan yang dikirim tentu harus memiliki kompetensi khusus. Di antaranya keahlian komunikasi lintas budaya hingga mitigasi risiko. Seiring dengan itu, kesiapan operasional menjadi krusial mengingat Gaza adalah zona konflik aktif dengan kompleksitas tinggi. ■ PYB